

Catatan Atas Laporan Keuangan

Satuan Kerja BPTD WILAYAH X PROV. JATENG & D.I.Y SEMESTER II TA 2019

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019



*Jalan Abdul Rahman Saleh No. 142a Semarang
Jawa Tengah*

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I.Y. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Semarang, 20 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl. HE
NIP 19620806 198903 1 012

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	6
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	7
V. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	31
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	34
F. Pengungkapan Penting Lainnya	35



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jl. Abdul Rahman Saleh No. 142A
Kota Semarang Jawa Tengah 50149

Telp. (024) 7612254

Fax.(024) 7612254
Email : bptdjatengdiy@gmail.com

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I.Y yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Semarang, 20 Januari 2020
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ir. PRASETYO KENTJONO, Dipl, HE
NIP 19620806 198903 1 012

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Semester II Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Anggaran Belanja Negara pada Semester I TA 2019 adalah sebesar Rp 200.553.922.514.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 899.658.423.300 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 113.678.283.727; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 613.909.650.763; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 172.070.488.810. Nilai Kewajiban dan Ekuitas adalah sebesar Rp 899.658.423.300.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 589,583,000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp 186,365,157,135. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 62,371,186 dan defisit sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp (-185,619,576,687).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp. 790,275,034,670 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (-185,619,576,687) kemudian ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 300,422,666,158 dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas sebesar Rp. 109,383,388,630 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 899,658,423,300.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan

Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Semester II untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019 SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				
	1. PENERIMAAN DALAM NEGERI	0	739,394,465	739,394,465	0,00
	a. Penerimaan Perpajakan	0	0	0	0,00
	b. Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	739,394,465	739,394,465	0,00
	2. HIBAH	0	0	0	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	739,394,465	739,394,465	0,00
B	BELANJA				
	Belanja Pegawai	82,023,995,000	77,108,632,007	(4,915,362,993)	94.01
	Belanja Barang	76,204,187,000	72,268,983,931	(3,935,203,069)	94.84
	Belanja Modal	51,384,731,000	51,176,306,576	(208,424,424)	99.59
	Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0,00
	Subsidi	0	0	0	0,00
	Hibah	0	0	0	0,00
	Bantuan Sosial	0	0	0	0,00
	Belanja Lain-lain	0	0	0	0,00
	JUMLAH BELANJA (B I + B II + B III)	209,612,913,000	200,553,922,514	(9,058,990,486)	95.68
C	PEMBIAYAAN				
	1. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
	a. Perbankan Dalam Negeri	0	0	0	0,00
	b. Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)	0	0	0	0,00
	2. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)	0	0	0	0,00
	a. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	0	0	0	0,00
	b. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	0	0	0	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN (C.I + C.2)	0	0	0	0,00

II. NERACA

NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH
1	2
ASET	
ASET LANCAR	
Persediaan	113,678,283,727
JUMLAH ASET LANCAR	113,678,283,727
ASET TETAP	
Tanah	183,917,291,504
Peralatan dan Mesin	232,946,853,124
Gedung dan Bangunan	303,414,191,904
Jalan, Irigasi dan Jaringan	29,549,529,975
Aset Tetap Lainnya	18,956,874,829
Konstruksi Dalam Pengerjaan	-
Akumulasi Penyusutan	-154,875,090,573
JUMLAH ASET TETAP	613,909,650,763
ASET LAINNYA	
Aset Tak Berwujud	2,858,158,400
Aset Lain-lain	259,539,652,330
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	-90,327,321,920
JUMLAH ASET LAINNYA	172,070,488,810
JUMLAH ASET	899,658,423,300
EKUITAS	
EKUITAS	
Ekuitas	899,658,423,300
JUMLAH EKUITAS	899,658,423,300
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	899,658,423,300

III. LAPORAN OPERASIONAL

**LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**

URAIAN	JUMLAH
1	3
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
Pendapatan Negara Bukan Pajak	589.583.000
Pendapatan Hibah	0
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	589.589.000
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	77.108.632.00
Beban Persediaan	823.364.972
Beban Barang dan Jasa	53.030.692.741
Beban Pemeliharaan	7.841.407.576
Beban Perjalanan Dinas	8.8853.736.439
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0
Beban Bunga	0
Beban Subsidi	0
Beban Bantuan Sosial	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	38.707.323.400
Beban Penyisihan Piutang Tak tertagih	0
Beban Transfer	0
Beban Lain-Lain	0
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	186.365.157.135,00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(185.775.574.135,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	93.626.262
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	93.626.262
POS LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS / (DEFISIT) – LO	(185.619.576.687)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2019
SATUAN KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT WILAYAH X
PROVINSI JAWA TENGAH DAN D.I.YOGYAKARTA**

URAIAN	JUMLAH
1	2
EKUITAS AWAL	790.275.034.670
SURPLUS/DEFISIT – LO	(185.619.576.687)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	(5.419.700.841)
Penyesuaian Nilai Aset	0
Penyesuaian Nilai Kewajiban	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(1.815.434.569)
Koreksi Lain-Lain	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	300.422.666.158
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	109.383.388.630
EKUITAS AKHIR	899.658.423.300

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Satker Balai Pengelola

Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jateng dan D.I.Y

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No.2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di Jalan Abdul Rahman Saleh No. 142A Semarang.

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

A.3. Basis Akuntansi

Akuntansi

Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan

A.5. Kebijakan Akuntansi

Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-

prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-

LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi

atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti

Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak	100%

	tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Piutang

Jangka

Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 9 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

Aset

Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam

Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
<i>Software</i> Komputer	4 tahun
<i>Franchise</i>	5 tahun

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih

(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	50%

	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

Penyusutan

Aset Tetap

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No. 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola

Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Implementasi

(10) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali

Akuntansi

Pemerintah

Berbasis

Akrual

Pertama kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2015 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2016.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

Realisasi

Pendapatan Rp

739.394.465

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 739.394.465 Pendapatan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terdiri dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha; Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum; Pendapatan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika; Pendapatan Denda; dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

URAIAN	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Lain-lain	0	0	0
Jumlah	0	0	0

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN				% REAL. PEND
			TAHUN INI	JUMLAH SAMPAI DENGAN TAHUN INI	PENGEMBALIAN SAMPAI DENGAN TAHUN INI	JUMLAH NETTO SAMPAI DENGAN TAHUN INI	
1	2	3	4	5	6	7	8
	TRANSAKSIKAS						
	I Penerimaan Dalam Negeri						
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK						
425	PENDAPATAN PNPB LAINNYA						
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN						
42512	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN						
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	93,626,262	93,626,262	0	93,626,262	0.00
	Jumlah Penerimaan 42512	0	93,626,262	93,626,262	0	93,626,262	0.00
42513	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN						
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	589,583,000	589,583,000	0	589,583,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 42513	0	589,583,000	589,583,000	0	589,583,000	0.00
	Jumlah Penerimaan 4251	0	683,209,262	683,209,262	0	683,209,262	0.00
4259	Pendapatan Lain-Lain						
42591	Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu I						
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	12,808,968	12,808,968	0	12,808,968	0.00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	43,376,235	43,376,235	0	43,376,235	0.00
	Jumlah Penerimaan 42591	0	56,185,203	56,185,203	0	56,185,203	0.00
	Jumlah Penerimaan 4259	0	56,185,203	56,185,203	0	56,185,203	0.00
	Jumlah Penerimaan 425	0	739,394,465	739,394,465	0	739,394,465	0.00
	Jumlah Penerimaan 42	0	739,394,465	739,394,465	0	739,394,465	0.00
	Jumlah Penerimaan Dalam Negeri	0	739,394,465	739,394,465	0	739,394,465	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	739,394,465	739,394,465	0	739,394,465	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN	0	739,394,465	739,394,465	0	739,394,465	0.00
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	0	739,394,465	739,394,465	0	739,394,465	0.00

Realisasi Belanja

Negara Rp

200.553.922.514

B.2. Belanja

Realisasi Belanja Instansi pada Semester II Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 200.553.922.514 dari anggaran belanja sebesar Rp 209.612.913.000

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Semester II TA 2019

URAIAN	2019		
	ANGGARAN	REALISASI	% REAL ANGG.
Belanja Pegawai	82.023.995.000	77.108.632.007	94,01
Belanja Barang	76.204.187.000	72.268.983.931	94,84
Belanja Modal	51.384.731.000	51.176.306.576	99,59
Total Belanja Kotor	209.612.913.000	200.553.922.514	95,68
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	209.612.913.000	200.553.922.514	95,68

Belanja Pegawai

Rp

45.430.731,000

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada Semester II Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp 45,430,731,000 dari anggaran belanja sebesar Rp 82.023.995.000.

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja Pegawai

URAIAN	2019		
	Anggaran	Realisasi	% REAL ANGG
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Gaji Pokok PNS	32,106,021,000	29,504,475,340	91.90
Belanja Pembulatan Gaji PNS	1,369,000	161,059	11.76
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	3,061,554,000	2,600,464,790	84.94
Belanja Tunj. Anak PNS	843,094,000	690,416,316	81.89
Belanja Tunj. Struktural PNS	55,200,000	50,580,000	91.63
Belanja Tunj. PPh PNS	68,547,000	20,519,204	29.93
Belanja Tunj. Beras PNS	1,812,432,000	1,663,052,880	91.76
Belanja Uang Makan PNS	5,757,019,000	5,275,531,550	91.64
Belanja Tunjangan Umum PNS	1,725,495,000	1,575,295,000	91.30
Jumlah Belanja Gaji dan Tunj. PNS	45,430,731,000	41,380,496,139	91.09
Belanja Lembur			
Belanja Uang Lembur	229,603,000	0	0,00
Jumlah Belanja Lembur	229,603,000	0	0,00
Belanja Tunj. Khusus dan Belanja Pegawai Transito			
Belanja Pegawai (Tunj. Khusus/ Kegiatan)	36,363,661,000	35,728,135,868	98.25
Jumlah Belanja Tunj. Khusus dan	36,363,661,000	35,728,135,868	98.25

Belanja Pegawai Transito			
Total Belanja Kotor (1+2+3)	82.023.995.000	77,108,632,007	94.01
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja Pegawai	82.023.995.000	77,108,632,007	94.01

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 41,380,496,139,- Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar 91,09 persen dari 31 Desember 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang;
2. Adanya penambahan pegawai dalam rangka Pengalihan P3D Terminal Tipe A dan Jembatan Timbang sesuai dengan amanat Undang-Undang; dan
3. Penambahan remunerasi PNS.

Rincian jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdapat pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Catatan atas Laporan Keuangan ini.

Belanja Barang

Rp

72,268,983,931

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Per 31 Desember 2019 adalah Rp 72,268,983,931.

URAIAN	31 Desember 2019
Belanja Keperluan Perkantoran	31,933,318
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	387,600,000
Belanja Barang Operasional Lainnya	103,136,000
Belanja Honor Output Kegiatan	7,358,400,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	823,169,004
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0
Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	2,005,189,846
Belanja Sewa	1.209.000.000
Belanja Jasa Profesi	10,800,000
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	53,207,100
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	282,622,090
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1,369,206,570

Belanja Perjalanan Biasa	0
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	163,789,065
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	288,012,000
JUMLAH	14.054.131.675

Belanja Bantuan Sosial Rp 0

B.5 Belanja Bantuan Sosial

NIHIL

Belanja Modal Tanah Rp 0

B.6 Belanja Modal Tanah

NIHIL

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 51,176,306,576

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester II TA 2019 adalah sebesar Rp 51,176,306,576

URAIAN	31 Desember 2019
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30,690,140,750
Jumlah Belanja Kotor	30,690,140,750

Pengembalian Belanja	0
JUMLAH BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	30,690,140,750

Belanja Modal

Gedung dan

Bangunan Rp

4,346,477,000

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Semester II TA 2019 adalah sebesar Rp 4,346,477,000

URAIAN	31 Desember 2019
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	4,346,476,750
Jumlah Belanja Kotor	4,346,476,750
Pengembalian Belanja	0
JUMLAH BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	4,346,476,750

Belanja Modal

Jalan, Irigasi,

dan Jaringan Rp

0

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NIHIL

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,-. Kas di Bendahara Pengeluaran meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pengeluaran untuk belanja.

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp0*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak.

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp0,-. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas Setara kas yaitu investasi jangka pendek

yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan

Piutang Bukan

Pajak Rp0

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,- Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya Rincian Piutang Bukan Pajak.

Bagian Lancar

TPA Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya Rincian Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran .

Penyisihan

Piutang Tak

Tertagih – Piutang

Jangka Pendek

Rp (0)

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,- Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan

yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya
Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp 0*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan yang
masih harus
diterima Rp 0*

C.9 Pendapatan Yang masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

*Persediaan Rp
113,678,283,727*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 113,678,283,727. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan

kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

PERSEDIAAN	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	823,213,172
Suku Cadang	72,854,310
Pita Cukai, Materai dan Legas	151.800
Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	2.548.482.250
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	38.826.023.454
Jalan, irigasi dan jaringan untuk diserahkan kepada masyarakat	63.929.821.055
Aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	6.069.422.000
Aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat	393.332.000
JUMLAH	111.891.602.541

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Tagihan TP/TGR

Rp0

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

TPA Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0,-.

Penyisihan Piutang

Tak Tertagih –

Piutang Jangka

Panjang Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang.

Tanah Rp

183,917,291,504

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Tanah per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 183,917,291,504

Peralatan dan

Mesin

Rp

232,946,853,124

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 adalah Rp 232,946,853,124

*Gedung dan
Bangunan
Rp
303,414,191,904*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 adalah sebesar
Rp 303,414,191,904

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp
29.549.529.975*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo jalan, irigasi, dan jaringan per 31 Desember 2019 adalah
sebesar Rp 29.549.529.975.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp 2,224,000*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2019 adalah Rp
2,224,000

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan Rp*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per tanggal 31
Desember 2019 adalah sebesar Rp 0,- yang merupakan
pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya
belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp
(1,565,008,062)*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019
adalah sebesar Rp (1,565,008,062). Akumulasi Penyusutan Aset
Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan

berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan.

Aset Tak

C.20 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp

1,468,675,900

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 1,468,675,900

C.21 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain Rp

393,332,000

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 393,332,000

Akumulasi

C.22 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan dan

Amortisasi Aset

Lainnya Rp

1,565,008,062

Saldo akumulasi penyusutan asset lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (1,565,008,062). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

*Uang Muka dari
KPPN Rp0*

C.23 Uang Muka dari KPPN

NIHIL

*Utang kepada
Pihak Ketiga Rp0*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

NIHIL

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0*

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

NIHIL

*Ekuitas
Rp
790,275,034,670*

C.26 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (790,275,034,670). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 589,583,000

Rp 589,583,000

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2019

URAIAN	2019		
	Anggaran	Realisasi	% Realisasi Anggaran
Pendapatan Jasa	0	0	0
Pendapatan Negara Bukan Pajak (UMUM/ NON FUNGSIONAL)	0	589,583,000	0
Jumlah	0	589,583,000	0

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Rp

Jumlah beban pegawai per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 77,108,632,007. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

77,108,632,007

*Beban
Persediaan Rp
823,364,972*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 823,364,972. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019.

*Beban Barang
dan Jasa Rp
53,030,692,741*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 53,030,692,741. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 7,841,407,576. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Beban
Pemeliharaan
Rp
7,841,407,576*

*Beban
Perjalanan
Dinas Rp
8,853,736,439*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 8,853,736,439. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat
Rp 0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

NIHIL

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
Rp
38,707,323,400*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 38,707,323,400. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Beban

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Piutang Tak

TertagihRp0

Beban Lain-lain

D.11 Beban Lain-lain

Rp0

NIHIL

Surplus /Defisit

D.12 Kegiatan Non Operasional

dari Kegiatan

Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 62,371,186. Kegiatan Non Operasional adalah kelompok pendapatan atau beban yang sifatnya tidak rutin.

Non

Operasional Rp

62,371,186

Pos Luar Biasa

D.13 Pos Luar Biasa

Rp(0)

NIHIL

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp

790,275,034,670

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 790,275,034,670.

Defisit LO Rp

(185,619,576,687)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (185,619,576,687). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0

E.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 September 2019 dan 30 September 2018 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Koreksi Aset Tetap

Rp0

E.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

NIHIL

*Koreksi Atas Beban
Rp 0*

E.5 Koreksi Atas Beban

NIHIL

*Koreksi Atas
Pendapatan Rp 0*

E.6 Koreksi Atas Pendapatan

NIHIL

*Koreksi Hibah
Masuk/Keluar Rp 0*

E.7 Koreksi Hibah Masuk/Keluar

NIHIL

*Ekuitas Akhir Rp
899,658,423,300*

E.7 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp
899,658,423,300

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor SK.003/KU.303/BPTD-X/2018 tanggal 01 Februari 2018 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran dan Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta Tahun Anggaran 2019, Pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/ Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada negara dan menandatangani SPM, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan D.I.Yogyakarta telah dilakukan penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran dan Keuangan yaitu:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Ir. Prasetyo Kentjono
Pejabat Pembuat Komitmen	: 1. Heri Supardiman
	2. Idris
	3. Budi Suryo Utomo

Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Devi Malicha
Bendahara Pengeluaran : Prameswari Bayu O.
Bendahara Penerimaan : Lidya Larasati
Petugas Operator Simak : Fardhan Hafidra
Petugas Operator Saiba : Moh Khoirudin Nawawi